

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah dan implikasinya terhadap Good Governance di perguruan tinggi negeri non Badan Layanan Umum wilayah Kalimantan Timur

Kartika Widyaningrum^{1*}, Sri Mintarti², Priyagus³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan implikasinya terhadap Good Governance perguruan tinggi negeri wilayah Kalimantan Timur. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, sedangkan alat analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (2) SPI berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (3) Penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan; (4) Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance; (5) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Good Governance; (6) SPI berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Good Governance; (7) Penerapan SAP berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Good Governance; (8) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Good Governance melalui kualitas laporan keuangan; (9) SPI berpengaruh positif terhadap Good Governance melalui kualitas laporan keuangan; (10) Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap Good Governance melalui kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Pemanfaatan teknologi informasi; sistem pengendalian intern; penerapan standar akuntansi pemerintahan; kualitas laporan keuangan dan Good Governance.

Factors affecting the quality of government financial reports and their implications for Good Governance in non-public service agency state university on East Kalimantan region

Abstract

This research aims to empirically examine the effect of the use of information technology, internal control systems and the application of government accounting standards to the quality of government financial reports and their implications for the Good Governance of state universities in East Kalimantan. The data collection method uses a questionnaire, while the data analysis tool used is Partial Least Square (PLS). Result of research indicate that; (1) The use of information technology has a positive but not significant effect on the quality of financial statements; (2) The internal control system has a positive but not significant effect on the quality of financial statements; (3) The application of government accounting standards has a significant effect on the quality financial statements ; (4) The quality of financial statements has a significant effect on Good Governance; (5) The use of information technology has a positive but not significant effect on Good Governance; (6) The internal control system has a positive but not significant effect on Good Governance; (7) The application of government accounting standards has a positive but not significant effect on Good Governance;(8) The use of information technology has a positive effect on Good Governance through the quality of financial statements; (9) The internal control system has a positive effect on Good Governance through the quality of financial statements; (10) The application of government accounting standards has a positive effect on Good Governance

Keywords: Technology information used, internal control system; application of government accounting standards; quality of financial statements; good governance.



PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan sangat diperlukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, sehingga pengelolaan keuangan negara benar-benar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau lebih dikenal dengan istilah Good Governance. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik (Salam, 2004). Mardiasmo (2009) mengemukakan 3 karakteristik pelaksanaan good governance yang dalam diperankan oleh sektor publik dalam mengelola keuangan, yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik dan value for money (economy, efficiency, and effectiveness). Salah satu upaya untuk mewujudkan ketiga karakteristik tersebut, pemerintah dituntut untuk memberikan informasi dan mengungkapkan aktivitas serta kinerja finansialnya kepada stakeholder melalui penyajian laporan keuangan pemerintah yang tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat dibandingkan; dan 4) Dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan mengakibatkan kerugian negara, kelemahan administrasi, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Laporan keuangan yang dihasilkan akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang tertuang dalam Laporan Keuangan harus dapat dipahami para pemakainya.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Seperti yang dikatakan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2018 pihaknya sudah membeberkan temuan-temuan pemeriksaan laporan keuangan diantaranya adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan dalam penatausahaan dan pencatatan kas setara kas, PNBK, belanja, piutang PNBK, persediaan, aset tetap dan utang terutama pada kementerian/lembaga ([suara.com/news/2019, 29 Mei 2019](http://suara.com/news/2019,29%20Mei%202019)). Meskipun BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP Tahun 2018 namun masih banyak fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah, sehingga membuat tuntutan masyarakat terhadap good governance juga meningkat. Hal tersebut juga mendorong pemerintah untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Untuk mempermudah penyusunan Laporan Keuangan, pemerintah pusat membangun sistem yang menjadi komponen terbesar modernisasi pengelolaan perbendaharaan negara dengan memberikan fasilitas kebutuhan proses pelayanan mulai dari penganggaran hingga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dikenal dengan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan hasil konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Pada tahun 2017, pemerintah telah mengembangkan Aplikasi LKPP Terintegrasi untuk konsolidasi LKKL dan LKBUN secara otomatis, perbaikan sistem untuk TAE melalui penyempurnaan Aplikasi SAIBA dan Aplikasi SIMAK BMN, serta pengembangan Integrasi Simak BMN ke dalam e-Rekon&LK. Aplikasi terintegrasi dilakukan melalui SPAN, yaitu dengan menggabungkan data e-Rekon&LK dan data buku besar SPAN. Untuk keperluan penyajian LKPP yang akurat, Aplikasi LKPP Terintegrasi menyediakan jurnal penyesuaian dan jurnal eliminasi akun-akun timbal balik sesuai kebijakan konsolidasi LKPP. Informasi lainnya yang dibutuhkan dapat diproses melalui kertas kerja manual diluar Aplikasi LKPP Terintegrasi.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sistem

pengendalian intern, yang meliputi berbagai alat manajemen untuk mencapai berbagai tujuan yang luas yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan, dan memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah. Menurut Aren (2008), tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tercapainya laporan keuangan yang berkualitas, sehingga pelaporan keuangan yang dihasilkan andal, aset milik daerah tetap aman dan peraturan perundang-undangan dijalankan. Jika pengendalian internal tersebut terimplementasikan dengan efisien dan efektif maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (Aren, 2008). Dita Arfianti (2011) membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Manuppan Bangun Tua (2015) juga membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, semakin baik sistem pengendalian intern maka kualitas informasi laporan keuangan tersebut akan semakin baik. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Desiana dkk (2014) yang membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan. Desiana (2014) mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern yang baik belum tentu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Isu tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) mendapat perhatian cukup besar dari BPK selaku auditor eksternal yang senantiasa menguji SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup pengujian yang akan dilaksanakannya. Adapun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 Nomor : 71/LHP/XV/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, BPK menemukan 19 kelemahan pengendalian intern dan 6 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi secara material kewajaran LKPP Tahun 2018. Hasil pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2018, antara lain meliputi : Pemerintah belum memiliki sistem untuk menganalisa hubungan antar Akun LKPP dan penyesuaian rasio defisit;

Pengendalian atas Pengelolaan Kas pada Kementerian/Lembaga belum memadai berdampak adanya rekening penampungan yang belum teridentifikasi, penyetoran sisa kas tidak tepat waktu, pengelolaan dana menggunakan rekening pribadi, dan penggunaan kas yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban;

Pengendalian atas pengelolaan persediaan pada K/L belum memadai berdampak adanya pelaksanaan stock opname serta penatausahaan dan pencatatan persediaan yang tidak sesuai ketentuan;

Pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap pada K/L belum memadai berdampak adanya saldo BMN yang tidak akurat serta penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap yang tidak sesuai ketentuan;

Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tak Berwujud pada K/L belum memadai berdampak adanya saldo BMN yang tidak akurat serta penatausahaan dan pencatatan Aset Tak Berwujud yang tidak sesuai ketentuan.

Adapun hasil Pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain meliputi :

Pengelolaan PNBPN pada 36 K/L dan pengelolaan piutang pada 18 K/L belum sesuai ketentuan;

Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja pada 67 K/L tidak sesuai ketentuan;

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang Prioritas Daerah dan tambahan DAK Fisik Percepatan Infrastruktur Publik Daerah, serta DAK Fisik Afirmasi TA 2018 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai.

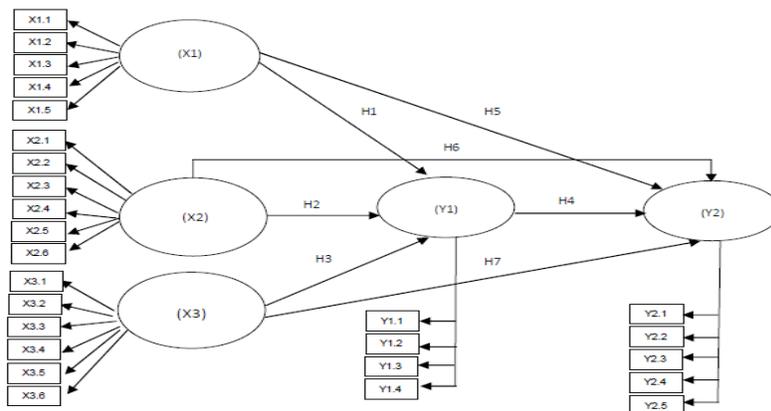
Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tuti Herawati (2017) dalam penelitiannya membuktikan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Salah satu entitas pelaporan

dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang memiliki beberapa entitas akuntansi yang diantaranya di Wilayah Kalimantan Timur terdiri dari Politeknik Negeri Samarinda, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Politeknik Negeri Balikpapan dan Institut Teknologi Kalimantan yang merupakan satker non Badan Layanan Umum (BLU) yang menjadi objek penelitian penulis. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun di tahun 2015, Kemenristekdikti memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hal ini karena adanya perubahan nomenklatur Ditjen Pendidikan Tinggi dari Kemendikbud menjadi Kemenristekdikti. Meskipun Kemenristekdikti memperoleh opini WTP, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, namun tidak mempengaruhi secara material kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Dengan predikat WTP yang diperoleh Kemenristekdikti maka ada konsekuensi yang harus dihadapi yaitu mempertahankan opini WTP dan terus meningkatkan kualitas Laporan Keuangannya sehingga dapat meminimalkan permasalahan yang ada dan akhirnya akan menciptakan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) yang menjadi tuntutan rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) non-BLU di wilayah Kalimantan Timur serta mengetahui implikasi kualitas laporan keuangan tersebut terhadap Good Governance di PTN Non-BLU tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian survei yang berfokus pada upaya menganalisis hubungan antar variabel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang menguji pengaruh 3 (tiga) variabel independen atau eksogen, yaitu: Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3). Variabel dependen atau endogen yang diteliti adalah kualitas laporan keuangan (Y1) dan Good Governance (Y2). Hubungan antar variabel dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Hubungan antar variabel penelitian



Penelitian ini dilakukan selama bulan April 2019 sampai September 2019 bertempat di 4 PTN yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Politeknik Negeri Samarinda, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Politeknik Negeri Balikpapan dan Institut Teknologi Kalimantan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan baik di

Direktorat, yaitu Unit Akuntansi Kuada Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) maupun di Jurusan yaitu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pembantu (UAKPBP) serta Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) pada keempat PTN tersebut. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 55 orang, yang terdiri atas: 4 orang Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, 4 orang Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, 8 orang Penyusun Laporan Keuangan/Operatir SAIBA, 4 orang Operator SPM, 4 orang Bendahara Pengeluaran, 4 orang Bendahara Pengeluaran Pembantu, 4 orang Bendahara Penerimaan, 4 orang Operator Persediaan, 8 orang Simak BMN, 1 orang staf keuangan, dan 10 orang SPI. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, kuesioner dan studi kepustakaan. Instrumen penelitian berupa angket/kuesioner disusun dalam bentuk checklist menggunakan skala Likert dengan rentang skor antara 1 – 5. Instrumen penelitian yang digunakan divalidasi menggunakan teknik korelasi product moment Pearson dan reliabilitas instrumen penelitian ditentukan dengan menggunakan Cronbach Alpha. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis Partial Least Square (PLS) dan dideskripsikan secara kuantitatif. Analisis PLS dilakukan dengan bantuan Software SmartPLS versi 2 for Windows.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pengukuran (Outer Model)

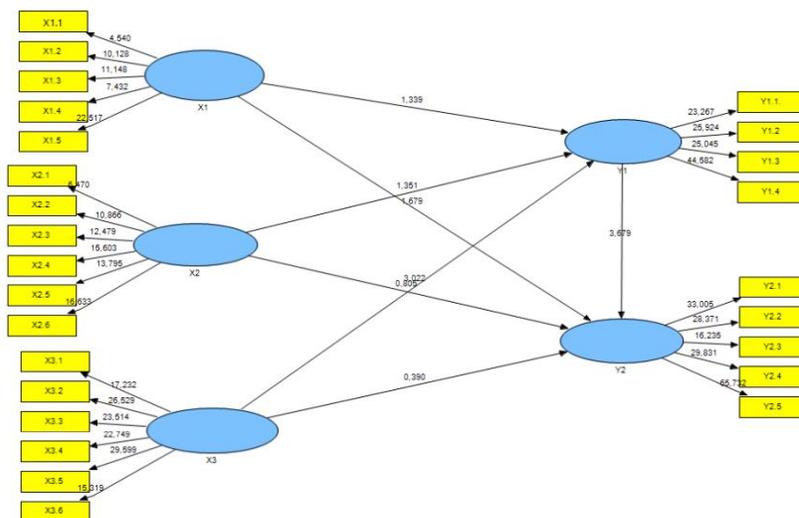
Model pengukuran atau outer model dengan indikator refleksif dievaluasi dengan convergent dan discriminant validity dari masing-masing indikatornya dan composite reliability untuk keseluruhan indikator. Sedangkan outer model dengan indikator formatif dievaluasi berdasarkan pada substantive contentnya yaitu dengan membandingkan besarnya relative weight dan melihat signifikansi dari ukuran weight tersebut (Chin, 1998 dalam Ghozali 2006;39).

Convergent Validity

Nilai convergent validity adalah nilai loading factor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai loading factor di atas 0,5 atau lebih dianggap memiliki validitas yang cukup kuat untuk menjelaskan konstruk laten (Ghozali 2006, Hair, Hult, et al. 2017).

Output SmartPLS untuk convergent validity dapat dilihat pada gambar 2 seperti berikut :

Gambar 2. Loading Factor Bootstrapping



Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa semua indikator yang membentuk konstruk Pemanfaatan

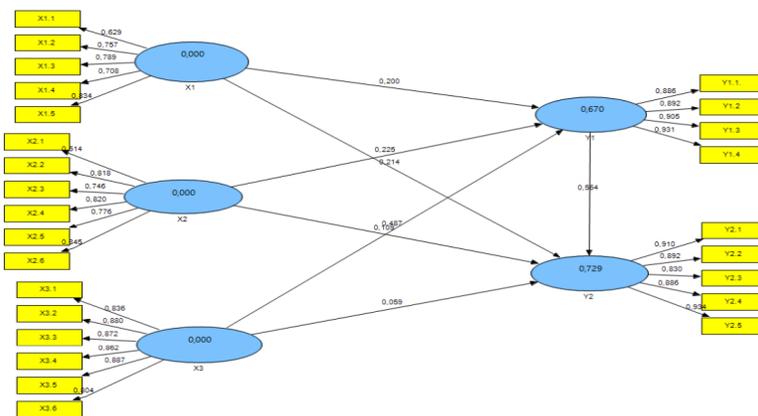
Teknologi Informasi (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3), Kualitas Laporan Keuangan (Y1) dan Good Governance (Y2) secara statistic adalah signifikan dengan nilai t hitung lebih besar dari 1,96. Demikian juga semua nilai outer loading indikator adalah di atas 0,5 sehingga dapat dikatakan bahwa konstruk yang dibuat telah memenuhi syarat convergent validity.

Discriminant Validity

Nilai ini merupakan nilai cross loading factor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading daripada konstruk yang lain.

Nilai cross loading pada gambar 3 menunjukkan bahwa untuk semua konstruk > 0,5 sehingga persyaratan discriminant validity terpenuhi.

Gambar 3. Loading Factor Partial Least Square



Average Variance Extracted (AVE)

Metode lain untuk melihat validitas indikator discriminant validity adalah dengan melihat nilai square root average variance extracted atau AVE. Nilai yang disarankan adalah 0,5. Output SmartPLS dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Goodness of Fit Model

	Composite Reliability	Cronbachs Alpha	AVE	R Square	Redundancy	Keterangan
X1	0,861869	0,801165	0,557341			Baik (fit)
X2	0,898625	0,862780	0,598726			Baik (fit)
X3	0,943286	0,927686	0,735110			Baik (fit)
Y1	0,946675	0,924828	0,816170	0,669737	0,177696	Baik (fit)
Y2	0,950610	0,934899	0,794036	0,728618	0,194793	Baik (fit)

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa nilai AVE masing-masing indikator di atas 0,5 sehingga discriminant validity berdasarkan average variance extracted (AVE) adalah valid.

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai composite reliability dari blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil composite reliability akan menunjukkan nilai memuaskan jika di atas 0,7. Uji reliabilitas juga bisa diperkuat dengan nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6.

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai Composite Reliability masing-masing konstruk adalah lebih dari 0,8 dan nilai Cronbach Alpha masing-masing konstruk lebih dari 0,8 sehingga semua konstruk pada model memenuhi kriteria reliabilitas.

Uji Model Struktural (Inner Model)

Uji pada model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-Square test untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantive.

Uji R-Square berfungsi untuk menunjukkan koefisien determinasi atau sejauh mana suatu konstruk mampu menjelaskan model, dengan ketentuan nilai R-Square $\leq 0,19$ adalah lemah, $\leq 0,33$ adalah moderat, dan $\geq 0,67$ adalah kuat. Semakin tinggi nilai R-Square maka semakin besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen (Chin dan Newsted 1999).

Uji Q-Square bertujuan untuk mengevaluasi nilai R-Square dengan mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameterinya (predictive relevance). Nilai Q-Square lebih besar dari 0 (nol) memperlihatkan bahwa model layak dikatakan memiliki predictive relevance, sedangkan nilai Q-Square kurang dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.

Dari tabel 3 menunjukkan bahwa :

Konstruk Kualitas Laporan Keuangan (Y1) menunjukkan nilai R-Square sebesar 0,67, hal ini berarti Pemanfaatan Teknologi (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2) dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) mampu menjelaskan varians Kualitas Laporan Keuangan (Y1) dengan kuat yaitu sebesar 67% sedangkan sisanya sebesar 33% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Konstruk Good Governance (Y2) menunjukkan nilai R-Square sebesar 0,73, hal ini berarti Pemanfaatan Teknologi (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) dan Kualitas Laporan Keuangan (Y1) mampu menjelaskan varians Good Governance (Y2) dengan kuat sebesar 73%, sedangkan sisanya sebesar 27% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Nilai Q-Square untuk masing-masing konstruk Kualitas Laporan Keuangan (Y1) dan Good Governance (Y2) adalah lebih besar dari 0 (nol) sehingga model dapat dikatakan layak memiliki predictive relevance.

Path Coefficients yang dihasilkan dari Bootstrapping dapat dilihat pada table 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Path Coefficients (Mean, STDEV, t-values)

Path Construct	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)	P-VALUE
X1 -> Y1	0,200	0,214	0,150	0,150	1,339	0,181
X1 -> Y2	0,214	0,251	0,127	0,127	1,679	0,094
X2 -> Y1	0,225	0,252	0,166	0,166	1,351	0,177
X2 -> Y2	0,109	0,108	0,135	0,135	0,805	0,421
X3 -> Y1	0,487	0,446	0,161	0,161	3,022	0,003

X3 -> Y2	0,059	0,043	0,150	0,150	0,390	0,696
Y1 -> Y2	0,564	0,545	0,153	0,153	3,679	0,000

Berdasarkan nilai loading factor maka dapat digambarkan diagram loading factor masing-masing indikator dalam model penelitian sebagai berikut :

Dalam PLS inner model juga disebut inner relation yang menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan substansi teori. Model persamaan dalam penelitian ini adalah :

$$Y1 = 0,200X1 + 0,225X2 + 0,487X3$$

$$Y2 = 0,214X1 + 0,109X2 + 0,059X3 + 0,564Y1$$

Dimana :

Y2 : Good Governance

Y1 : Kualitas Laporan Keuangan

X1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi

X2 : Sistem Pengendalian Intern

X3 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari persamaan model analisis jalur pertama dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut : (1) Koefisien X1 sebesar 0,200 menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi satu satuan nilai akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Y1) sebesar 0,200 satuan nilai, dengan asumsi variabel lainnya nol; (2) Koefisien X2 sebesar 0,225 menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Sistem Pengendalian Intern satu satuan nilai maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Y1) sebesar 0,225, dengan asumsi variabel lainnya nol; dan (3) Koefisien X3 sebesar 0,487 menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan satu satuan nilai maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Y1) sebesar 0,487, dengan asumsi variabel lainnya nol.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari persamaan model analisis jalur kedua dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut : (1) Koefisien X1 sebesar 0,214 menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi satu satuan nilai akan meningkatkan Good Governance (Y2) sebesar 0,214, dengan asumsi variabel lainnya nol; (2) Koefisien X2 sebesar 0,109 menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Sistem Pengendalian Intern satu satuan nilai akan meningkatkan Good Governance (Y2) sebesar 0,109, dengan asumsi variabel lainnya nol; (3) Koefisien X3 sebesar 0,059 menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan satu satuan nilai akan meningkatkan Good Governance (Y2) sebesar 0,059, dengan asumsi variabel lainnya nol; dan (4) Koefisien Y1 sebesar 0,564 menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Kualitas Laporan Keuangan satu satuan nilai akan meningkatkan Good Governance (Y2) sebesar 0,564, dengan asumsi variabel lainnya nol.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan T-table dengan nilai T-statistics yang dihasilkan dari proses bootstrapping dalam PLS. Hipotesis diterima jika nilai T-statistics lebih tinggi daripada T-table (1,96) dengan signifikansi level 5%.

Tabel 3. Uji Hipotesis berdasarkan Path Coefficient

Path	Hipotesis	Original Sample (O)	T Statistics (O/STERR)	P-VALUE	t-table $\alpha = 5\%$	Kesimpulan
X1 -> Y1	H1	0,200	1,339	0,181	1,96	Ditolak

X1 -> Y2	H5	0,214	1,679	0,094	1,96	Ditolak
X2 -> Y1	H2	0,225	1,351	0,177	1,96	Ditolak
X2 -> Y2	H6	0,109	0,805	0,421	1,96	Ditolak
X3 -> Y1	H3	0,487	3,022	0,003	1,96	Diterima
X3 -> Y2	H7	0,059	0,390	0,696	1,96	Ditolak
Y1 -> Y2	H4	0,564	3,679	0,000	1,96	Diterima

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai t-statistics untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan sebesar $1,339 < 1,96$ dan p-value sebesar $0,181 > 0,05$, serta dengan melihat hasil koefisiensi sebesar 0,200, artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sehingga H1 ditolak. Keadaan ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan, namun peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan, hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam memanfaatkan teknologi bidang akuntansi secara maksimal dan juga ada satuan kerja yang belum didukung oleh jaringan internet yang maksimal sehingga mengalami kendala dalam mengupload data ke e-rekon untuk laporan keuangan dan mengupload data LPJ ke sprint untuk Laporan Pertanggungjawaban Bendahara akibatnya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi, maka untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perlu peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang ilmu keuangan dan diikuti kompetensi bidang teknologi informasi komputer agar mampu memproses data keuangan secara cepat dan tepat sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan. Selain itu juga perlu didukung jaringan internet yang stabil serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang rusak/usang. Hal ini sejalan dengan Deni Darmawan (2013:21) yang menyatakan bahwa Teknologi Informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi yang selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi dan penggunaan informasi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian serupa dengan penelitian Riandani (2012) dan Arfianti (2011) bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Winidyaningrum (2009), Chodijah dan Hidayah (2018) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai t-statistics untuk variabel sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan sebesar $1,351 < 1,96$ dan p-value $0,177 > 0,05$, serta dengan melihat hasil koefisien sebesar 0,225, artinya sistem pengendalian intern berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga H2 ditolak. Keadaan ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern kurang mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik Sistem Pengendalian Intern belum mampu menaikkan kualitas laporan keuangan, hal ini dapat terjadi karena masih terdapat kelemahan dalam lingkungan pengendalian terutama karena kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pembinaan sumber daya manusia serta kurangnya komitmen terhadap kompetensi dan juga masih belum maksimalnya peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang berdampak pada tidak

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya pemerintah belum optimal dalam melakukan kegiatan penilaian risiko yang terdiri atas kegiatan identifikasi dan analisis risiko karena belum adanya metodologi yang komprehensif yang bisa menganalisis dampak dari risiko. Namun demikian review atas kinerja instansi pemerintah telah dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan harus adanya surat pernyataan telah di review oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Laporan Keuangan Pemerintah.

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2005). Penyebab lain lemahnya pengaruh sistem pengendalian intern adalah belum optimalnya upaya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan sehingga masih ditemukan temuan-temuan berulang dan lambat ditindaklanjuti. Temuan dalam penelitian ini mendukung penelitian serupa yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Karmila, 2012, Budiawan, 2014). Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Yusniyar, Darwanis dan Abdullah (2016), Saputra (2015), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai t-statistics untuk variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar $3,022 > 1,96$ dan nilai p-value sebesar $0,003 < 0,05$ serta dengan melihat nilai koefisien sebesar 0,487, artinya penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sehingga H3 diterima. Hal ini menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menjelaskan hubungan terkait antara SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan yaitu : “Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan (Mahmudi 2011:271).

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian serupa yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Defitri 2016, Oktaria dan Andini 2016, Herawati dan Nopianti 2017). Hasil penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah sebagai mana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Good Governance

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis keempat menunjukkan nilai t-statistics untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan terhadap Good Governance sebesar $3,679 > 1,96$ dan nilai p-value sebesar $0,000 < 0,05$ serta dengan melihat hasil koefisien sebesar 0,564, artinya kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance sehingga H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap peningkatan Good

Governance. Artinya semakin baik kualitas laporan keuangan maka akan dapat meningkatkan Good Governance dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan meningkat.

Menurut Muindro (2013;49) salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Temuan penelitian ini mendukung penelitian serupa yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap Good Governance (Yusniyar, Darwanis Abdullah 2016).

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Good Governance

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis kelima menunjukkan nilai t-statistics untuk variabel Teknologi informasi terhadap Good Governance sebesar $1,679 < 1,96$ dan nilai p-value sebesar $0,094 > 0,05$ serta dengan melihat hasil koefisien sebesar $0,214$, artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Good Governance, maka H_5 ditolak. Keadaan ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan Good Governance, namun peningkatan pemanfaatan teknologi informasi belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan, hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam memanfaatkan teknologi sehingga e-governance belum diterapkan secara maksimal. Untuk meningkatkan Good Governance maka teknologi informasi harus ditingkatkan secara maksimal sehingga pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Good Governance, perlu ditingkatkan sikap perilaku pengelolaan tugas dengan menggunakan teknologi informasi dalam penyelesaian pekerjaan, hal ini sejalan dengan Hanoni (2016) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah perilaku sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Suryandari (2015) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan good governance pada LAZ.

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Good Governance

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis keenam menunjukkan nilai t-statistics untuk variabel sistem pengendalian intern terhadap Good Governance sebesar $0,805 < 1,96$ dan nilai p-value sebesar $0,421 > 0,05$ serta dengan melihat hasil koefisien sebesar $0,109$, artinya Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Good Governance, maka H_6 ditolak. Keadaan ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara sistem pengendalian intern dengan Good Governance, namun peningkatan sistem pengendalian intern kurang mampu memberikan kontribusi yang cukup terhadap Good Governance. Hal ini mungkin disebabkan karena lemahnya sistem pengendalian intern yang tercermin dari belum jelasnya penguraian tanggung jawab pengamanan, belum memadainya pengendalian fisik atas asset, pencatatan transaksi yang kurang akurat dan tepat waktu khususnya pencatatan piutang pendidikan, pendokumentasian yang baik atas SPI, transaksi dan kejadian penting atas pengelolaan sistem informasi serta penetapan dan review atas indikator dan ukuran kerja. Peningkatan Good Governance dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem pengendalian intern, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian serupa yang menyatakan bahwa Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan good governance (Ristanti dkk., 2014; Sari, 2013).

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Good Governance

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan nilai t-statistics untuk variabel standar akuntansi pemerintahan terhadap Good Governance sebesar $0,390 < 1,96$ dan nilai p-value sebesar $0,696 > 0,05$ serta dengan melihat hasil koefisien sebesar $0,059$, artinya standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Good Governance, maka H_7 ditolak. Hal ini menunjukkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan kurang mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan Good Governance. Peningkatan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan perlu diikuti peningkatan sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sehingga paham terhadap standar dan aturan yang sudah ditetapkan maka dapat meningkatkan Good Governance.

Pengaruh Tidak Langsung Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Good Governance melalui Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh langsung konstruk Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Good Governance adalah $0,214$ dan pengaruh tidak langsungnya melalui Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan nilai $0,113$, sehingga Kualitas Laporan Keuangan dapat menaikkan pengaruh total Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Good Governance menjadi $0,327$. Dari hasil analisis uji pengaruh tidak langsung, diperoleh hasil perhitungan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_1) terhadap Good Governance (Y_2) melalui Kualitas Laporan Keuangan (Y_1) sebesar $0,327$ yang berarti berpengaruh positif sehingga H_8 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan Good Governance melalui kualitas laporan keuangan sebesar $0,327$.

Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akan berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan dan pada akhirnya akan mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pengaruh Tidak Langsung Sistem Pengendalian Intern terhadap Good Governance melalui Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh langsung konstruk Sistem Pengendalian Intern terhadap Good Governance adalah $0,109$ dan pengaruh tidak langsungnya melalui Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan nilai $0,127$, sehingga Kualitas Laporan Keuangan dapat menaikkan pengaruh total Sistem Pengendalian Intern terhadap Good Governance menjadi $0,236$. Dari hasil analisis uji pengaruh tidak langsung, diperoleh hasil perhitungan variabel Sistem Pengendalian Intern (X_2) terhadap Good Governance (Y_2) melalui Kualitas Laporan Keuangan (Y_1) sebesar $0,236$ yang berarti berpengaruh positif sehingga H_9 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Sistem Pengendalian Intern dapat meningkatkan Good Governance melalui kualitas laporan keuangan sebesar $0,236$.

Sistem pengendalian intern yang baik akan dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap kualitas laporan keuangan dan pada akhirnya akan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien.

Pengaruh Tidak Langsung Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Good Governance melalui Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh langsung konstruk Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Good Governance adalah $0,059$ dan pengaruh tidak langsungnya melalui Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan nilai $0,275$, sehingga Kualitas Laporan Keuangan dapat menaikkan pengaruh total Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Good Governance menjadi $0,333$. Dari hasil analisis uji pengaruh tidak langsung, diperoleh hasil perhitungan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_3) terhadap Good Governance (Y_2) melalui Kualitas Laporan Keuangan (Y_1) sebesar $0,333$ yang berarti berpengaruh

positif, maka H10 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat meningkatkan Good Governance melalui kualitas laporan keuangan sebesar 0,333. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa; (1) Pemanfaatan teknologi informasi secara langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, artinya terdapat pengaruh positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan, namun peningkatan pemanfaatan teknologi informasi belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam memanfaatkan teknologi secara maksimal; (2) Sistem pengendalian intern secara langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin baik sistem pengendalian intern belum mampu menaikkan kualitas laporan keuangan; (3) Penerapan standar akuntansi pemerintahan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan; (4) Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance, artinya semakin baik kualitas laporan keuangan maka akan semakin meningkatkan Good Governance; (5) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Good Governance, artinya terdapat pengaruh positif antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap Good Governance namun peningkatan pemanfaatan teknologi informasi belum mampu meningkatkan Good Governance; (6) Sistem pengendalian intern berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Good Governance, artinya terdapat pengaruh positif antara sistem pengendalian intern dengan Good Governance namun peningkatan sistem pengendalian intern belum mampu meningkatkan Good Governance; (7) Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Good Governance, artinya terdapat pengaruh positif antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan Good Governance, namun peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintahan belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan Good Governance; (8) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Good Governance melalui kualitas laporan keuangan, artinya semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akan berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan dan pada akhirnya akan mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance); (9) Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap Good Governance melalui kualitas laporan keuangan, artinya Sistem pengendalian intern yang baik akan dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap kualitas laporan keuangan dan pada akhirnya akan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien; dan (10) Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap Good Governance melalui kualitas laporan keuangan, artinya Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A. (2008), *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*, Jilid I, Erlangga, Jakarta.
- Arfianti, D. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)*, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bangun, M. (2015). *Pengaruh Good Governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem*



- Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kota Dumai). *Jom FEKON*, 2 (2).
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2019) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018, diunduh dari <http://bpk.go.id/ihs/2018/II>.
- Budiawan, D.A. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat), Skripsi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Chodijah, S & Hidayah, N. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Tekun*. 8 (1).
- Darmawan, D. (2013). Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Teori dan Aplikasi, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Defitri, S.Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *National Conference of Applied Sciences, Engineering, Business and Information Technology*, ISSN-2541-111x.
- Ghozali, I. (2006). *Structural Equation Modelling, Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hair, J.F., G.T.M.Hult, C.M. Ringle, dan M. Sarstedt., 2017, *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. 2nd Edition. Thousand Oaks, Sage.
- Herawati, T. & Nopianti, D. (2017) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *STAR-Study & Accounting Research*, XIV (2).
- Karmila. (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau), *Jurnal SOROT*, 9 (1).
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mulyadi. (2005). *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Edisi Kedua, BPF, Yogyakarta.
- Oktaria, M. & Andini, R. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance terhadap kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014), *Journal of Accounting*, 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Muindro, R. (2013). *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba Edisi Ketiga*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rahajo, D.B. (2019). Ini Tujuh Temuan BPK RI Terkait Laporan Pemeriksaan Keuangan, diakses melalui laman : <https://www.suara.com/news/2019/05/29/183137/> pada tanggal 29 Mei 2019.
- Riandani, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota), Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Ristanti, N.M.A., Sinarwati, N.K. & Sujana, E. (2014) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. 2 (1).



- Salam, D. S. (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Saputra, B. W. (2015). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kota Pekanbaru), *JOM. FEKON*, 2 (2).
- Sari, D. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten), *Simposium Nasional Akuntansi XVI-Manado*.
- Suryandari, E. F. (2015). Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Total Quality Management Terhadap Penerapan Good Governance di Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 16 (2), 145-154.
- Winidyaningrum, C. & Rahmawati. (2010). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosuka Wonosraten), *SNA XIII*. Purwokerto.
- Yusniar, D. & Abdullah. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern terhadap Good Governance dan Dampaknya pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPA Pemerintah Aceh), *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5 (2), ISSN 2302-0164.